

Majelis Ta'lim sebagai Model Pendidikan Non Formal Islam

Zuhri

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Feb 15th, 2019
Revised June 17th, 2019
Accepted Juni 20th, 2019

Keyword:

Education model
Islamic education
Majelis Ta'lim
Non formal education

ABSTRACT

The article wants to discuss the existence of the *majelis ta'lim* as one model of Islamic non-formal education. The discussion uses a qualitative descriptive method by examining library sources and supported by field data. The results of the discussion show that *majelis ta'lim* is one of non formal Islamic Education system, *majelis ta'lim* has role and function that is very important in growing and developing of Islamic education. The implementation of this education can help to understand the developing process in religious and community life for members of *majelis ta'lim*. Now a days, function and role of *majelis ta'lim* is reduced, so that lack and not optimal for the people. Generally *majelis ta'lim* is held potluck, as decitation group, the recitation that was held by muslim especially female voluntarily, and without preparation.

Copyright © 2019, AL-USWAH
All rights reserved

Corresponding Author:

Zuhri

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru, Indonesia
Email: zuhritauhid8780@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama yang dilaksanakan secara sadar, baik dari pihak pendidik maupun pihak terdidik. Kesadaran dalam melaksanakan pendidikan adalah dimaksudkan untuk mencapai kedewasaan dan

kematangan berfikir serta mampu menjadi manusia bertanggung jawab. Hal ini diusahakan melalui beberapa proses pendidikan, yaitu dapat melalui pendidikan formal, informal dan nonformal.

Salah satu bentuk pendidikan nonformal yang berkembang sangat pesat di masyarakat¹ adalah kegiatan majelis ta'lim yang tumbuh seperti jamur di musim penghujan sangat marak dan masif perkembangannya, fenomena tersebut juga terjadi di wilayah kabupaten/kota di seluruh pelosok Provinsi Riau.² Hal ini sebenarnya menjadi sesuatu yang menggembirakan, menandakan kesadaran keberagaman masyarakat yang semakin berkembang dan meningkat serta wujud kepedulian masyarakat pada pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi kehidupan ini. Hal ini juga nampaknya menjadi *trend* dan gaya hidup pada masyarakat saat ini, terutama masyarakat terdidik dan daerah perkotaan.

Majelis ta'lim sebagai salah satu bentuk pendidikan Islam yang bersifat nonformal, tampak memiliki kekhasan tersendiri. Dari segi nama jelas kurang lazim di kalangan

masyarakat Islam Indonesia, bahkan sampai di negeri Arab. Nama itu tidak dikenal, meskipun akhir-akhir ini majelis ta'lim sudah berkembang begitu pesat. Kekhasan lain dari majelis ta'lim adalah tidak terikat pada faham dan organisasi keagamaan yang sudah tumbuh dan berkembang, sehingga menyerupai kumpulan pengajian yang diselenggarakan atas dasar kebutuhan untuk memahami Islam disela-sela kesibukan bekerja dan bentuk-bentuk aktivitas lainnya atau sebagai pengisi waktu bagi ibu-ibu rumah tangga.³

Sesungguhnya keberadaan majelis ta'lim⁴ di tengah-tengah masyarakat sudah tidak asing lagi di kalangan umat Islam. Majelis ta'lim merupakan lembaga pendidikan tertua dalam Islam. Walaupun dahulu tidak disebut majelis ta'lim, namun

³Khozin, *Jejak-jejak Pendidikan Islam di Indonesia* (Bandung: Rineka Cipta, 1996), 236

⁴Penamaan majelis ta'lim belakangan muncul dalam *trend* perkembangan sosial dan melahirkan identitas tersendiri, yang membedakan dengan pengajian umum biasa, yaitu sifatnya yang tetap dan berkesinambungan. Akhirnya, kegiatan yang bernama majelis ta'lim menjadi kebutuhan masyarakat Islam. Dari tradisi yang berkembang selama ini, majelis ta'lim merupakan tempat berkumpul, tempat belajar dan tempat bermasyarakat khususnya bagi kaum ibu. Di samping menyelenggarakan kegiatan pokok pengajian, majelis-majelis ta'lim memiliki kegiatan tambahan yang memiliki nilai sosial, seperti pengumpulan iuran dan dana sosial yang disumbangkan untuk menyantuni anak yatim piatu, membantu anggota yang dalam kesulitan, dan sebagainya. Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Manajemen Lembaga Dakwah* (Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam, Proyek Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Pusat, 2003), 29

¹Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 55 ayat 1, Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Pada pasal 52 ayat 1 juga dijelaskan bahwa Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

²Dalam data yang didapatkan, pada tahun 2015 jumlah majelis ta'lim di seluruh Provinsi Riau telah mencapai 4.124 buah, jumlah ini adalah seluruh majelis ta'lim baik yang sudah terdaftar di Kementerian Agama kabupaten/kota maupun yang belum tercatat. Data diambil dari kantor BKMT Provinsi Riau di kawasan kompleks Masjid Agung An-Nur Kota Pekanbaru pada tanggal 10 Maret 2015.

pengajian Nabi Muhammad SAW. berlangsung secara sembunyi-sembunyi tersebut berlangsung dan berjalan layaknya majelis ta'lim. Pada periode Madinah, ketika Islam telah menjadi kekuatan nyata dalam masyarakat, Nabi Muhammad SAW. duduk di Masjid Nabawi untuk memberikan pengajian kepada para sahabat, yang dalam sejarah terkenal dengan *Ashab al-Shufa*.⁵ Mereka ini mengkhususkan diri untuk mendekati Nabi untuk mendapatkan pelajaran dan pengetahuan agama lebih banyak.

2. PEMBAHASAN

Sesungguhnya keberadaan majelis ta'lim⁶ di tengah-tengah masyarakat sudah tidak asing lagi. Majelis ta'lim yang dimulai sejak masa Rasulullah SAW. berada di

Makkah, mengalami perkembangan serta kemajuan yang pesat setelah Rasul hijrah ke Madinah. Majelis ta'lim yang pada awalnya hanya sebagai tempat mempelajari dan mendalami ibadah mahdhah, berkembang lebih luas menjadi tempat pembelajaran mu'amalah, urusan sosial dan politik, pusat pembelajaran dan pembinaan umat, dan sebagainya. Pada masa sahabat, tabi'in dan seterusnya sampai pada masa jayanya umat Islam selama lebih kurang tujuh abad, ternyata majelis ta'lim lebih pesat lagi perkembangan dan perannya, karena pada masa itu majelis ta'lim juga sebagai tempat pembahasan dan pengajian berbagai macam ilmu, baik ilmu agama, seperti ilmu fiqih, kalam, hadits, tafsir dan sebagainya, maupun ilmu-ilmu umum seperti ilmu pengetahuan alam, matematika, sejarah, sosial, politik dan lain-lain. Karena itu tidak heran dari majelis ta'lim ini lahir berbagai macam cabang ilmu agama dan ilmu umum sebagai produknya.

Majelis ta'lim telah memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam perkembangan pendidikan Islam. Pendidikan⁷ dapat dipahami

⁵Hasan 'Abd al-'Ali, *Al-Tarbiyah al-Islamiyah* (Mesir: Dar al-Fikra al-Arabi, 1978, 181-182; Muhammad Munir Mursi, *Al-Tarbiyah al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Kutub, 1982), 199

⁶Penamaan majlis ta'lim belakangan muncul dalam *trend* perkembangan sosial dan melahirkan identitas tersendiri, yang membedakan dengan pengajian umum biasa, yaitu sifatnya yang tetap dan berkesinambungan. Akhirnya, kegiatan yang bernama majlis ta'lim menjadi kebutuhan masyarakat Islam. Dari tradisi yang berkembang selama ini, majelis taklim merupakan tempat berkumpul, tempat belajar dan tempat bermasyarakat khususnya bagi kaum ibu. Di samping menyelenggarakan kegiatan pokok pengajian, majelis-majelis ta'lim memiliki kegiatan tambahan yang memiliki nilai sosial, seperti pengumpulan iuran dan dana sosial yang disumbangkan untuk menyantuni anak yatim piatu, membantu anggota yang dalam kesulitan, dan sebagainya. Departemen Agama RI., *Modul Pelatihan...*, 29

⁷Pendidikan dalam pengertian yang luas, berarti mengubah dan memindahkan nilai kebudayaan kepada setiap individu dalam masyarakat. Lihat keterangan Hasan Langgulung, *Pendidikan dan Peradaban Islam* (Jakarta: Al-Husna, 1992), 3. Pendidikan dalam pengertian tersebut memberi makna bahwa pendidikan mengacu kepada cara melakukan sesuatu perbuatan dalam hal mendidik. Abdurrahman Saleh Abdullah, *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, Terj. H. M. Arifin. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), Cet.

dalam arti luas, merupakan suatu usaha memberikan atau proses mentransfer ilmu pengetahuan atau keterampilan. Di harapkan dengan adanya pendidikan ini dapat membantu proses perkembangan pemahaman dalam hidup beragama dan bermasyarakat bagi setiap anak yang aktif dalam proses pendidikan. Selain itu Pendidikan juga merupakan sebuah sistem yang menjembatani antara kondisi actual dengan kondisi-kondisi profesionalisasi, civilisasi, habituralisasi dan humanisasi.⁸ Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan disengajakan serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar mencapai kedewasaan yang dicita-citakan. Karena itu, pendidikan⁹ yang mampu

ke-3, 129-158. Padahal pada prinsipnya pendidikan adalah suatu usaha sadar manusia dewasa untuk mempersiapkan generasi mudanya agar menjadi manusia yang diidamkan di masa depan. Lihat dalam, H. Arief Furchan, *Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: PT. Gama Media, 2004), 3. Lihat juga dalam Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 29.

⁸Redja Muadyaharjo, *Filsafat Ilmu Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), 64.

⁹Adalah suatu proses yang mempunyai tujuan yang biasanya diusahakan untuk menciptakan pola-pola tingkah laku tertentu pada anak atau orang yang sedang dididik, baca Hasan Langulung, *Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan* (Jakarta: PT. Pustaka Al-Husna, 1989), 32. Di samping itu pendidikan mengacu kepada sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman dan cara bertingkah laku sesuai dengan

mendorong terciptanya kuat daya pikir dan rasa merupakan hal yang tidak dapat dielakkan lagi dalam menghadapi kemajuan ilmu dan teknologi.

Pada zaman kemunduran umat Islam sekitar abad pertengahan, fungsi dan peran majelis ta'lim sangat berkurang, bahkan majelis ta'lim diberi pengertian dalam arti yang sempit yakni tempat pembelajaran ajaran Islam, khususnya yang terkait dengan ibadah *mahdhab* untuk kepentingan hidup di akhirat saja. Dan untuk masa kini, majelis ta'lim selain dapat dipahami secara sempit itu, juga umumnya majelis ta'lim itu diselenggarakan seadanya, sehingga apa yang disebut majelis ta'lim itu pada umumnya saat ini sebenarnya hanyalah sebagai kelompok pengajian, perwiridan yang diikuti oleh umat Islam secara sukarela dan tanpa adanya perencanaan yang matang sebelumnya.¹⁰ Oleh karena

kebutuhan, baca lebih lanjut dalam Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan* (Bandung: PT. Remadja Rosdakarya, 1995), 10. Untuk itulah, maka pemerintah melakukan suatu perubahan sistem, dari sentalistik kepada desentralisasi pendidikan. Dengan kebijakan ini telah memberikan angin segar kepada daerah untuk mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan kondisi daerah itu sendiri, sehingga ada pelimpahan sebagian kebijakan dari pendidikan, hal ini menunjukkan pelimpahan wewenang dalam pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat kepada daerah. Lebih lanjut baca Hujair AH Sanakiy, *Paradigma Pendidikan Islam* (Yogyakarta: PT. Satria Insania Press, 2005), 185.

¹⁰Pada umumnya majelis ta'lim adalah lembaga swadaya masyarakat murni. Ia dilahirkan, dikelola, dipelihara, dikembangkan dan didukung oleh anggotanya. Oleh karena itulah maka majelis ta'lim merupakan wadah

itu dapat dipahami kenapa majelis ta'lim pada saat itu kurang diminati, kurang berperan dalam membina umat, apalagi pada era modern saat ini yang penuh dengan kesibukan dan tantangan dalam kehidupan beragama.

Majelis ta'lim dapat digolongkan sebagai lembaga pendidikan non formal sesuai Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 26 ayat 4, bahwa satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar masyarakat dan majelis ta'lim, serta satuan pendidikan yang sejenis.¹¹ Majelis ta'lim akan terasa mempunyai makna bagi jamaahnya apabila kebutuhan masing-masing jamaah terpenuhi. Peranan para guru atau ustaz sangat penting untuk mengidentifikasi dan merespon kebutuhan-kebutuhan jama'ah majelis ta'lim, agar ia dapat menyesuaikan atau mengarahkan jamaah pada tujuan yang ingin dicapai.¹²

Dengan demikian majlis ta'lim adalah sebuah lembaga pendidikan non formal Islam, yang benar-benar sesuai sebagai pendidikan non formal itu sendiri. Ciri pendidikan non-formal adalah paket pendidikannya berjangka pendek, setiap program pendidikannya merupakan suatu paket yang sangat spesifik dan

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

¹¹Departemen Agama RI., *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2006), 19.

¹²Ibid., 30.

biasanya lahir dari kebutuhan yang mendadak, persyaratan lebih fleksibel baik dalam usia maupun tingkat kemampuan, persyaratan unsur-unsur pengelolaannya juga lebih fleksibel, materi pelajaran lebih luwes, tidak berjenjang kronologis, serta perolehan dan keberartian nilai kredensialnya tidak begitu terstandarisir. Sehingga secara umum bisa dikatakan majelis taklim sebagai lembaga pendidikan nonformal lebih lentur dan berjangka pendek.¹³

Padahal prinsip majelis ta'lim memiliki fungsi yang amat penting sebagaimana dikemukakan oleh Tutty Alawiyah AS, fungsi majelis ta'lim adalah: *Pertama*, tempat memberi dan memperoleh tambahan ilmu dan kemampuan. *Kedua*, tempat mengadakan kontak dan pergaulan sosial. *Ketiga*, tempat bersama-sama mewujudkan minat sosial. *Keempat*, tempat untuk mendorong agar lahir kesadaran dan pengamalan yang menyejahterakan hidup rumah tangga.¹⁴ Dari fungsi tersebut kelihatan bahwa majlis ta'lim merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan non formal yang cukup memberi andil dalam pengembangan pembinaan umat dan pembentukan perilaku anggota sehari-hari.

¹³Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 112.

¹⁴Departemen Agama RI., *Modul Pelatihan Manajemen Lembaga Dakwah* (Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam, Proyek Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Pusat, 2003), 30.

Menurut Davis dan Newstrom sebagaimana dikutip Edi Sutrisno, bahwa perilaku adalah bidang ilmu yang mempelajari dan mengaplikasikan pengetahuan tentang bagaimana manusia berperan atau berperilaku atau bertindak di dalam kehidupannya. Konsep dasar perilaku adalah memahami bahwa istilah “hukum tentang perbedaan individual” (*law of individual differences*) yang menyebutkan bahwa manusia secara keseluruhan, bahwa sifat manusia yang berbeda boleh dipelajari secara terpisah, tetapi pada akhirnya sifat-sifat ini merupakan bagian sebuah sistem yang menciptakan manusia secara keseluruhan. Perilaku yang bermotivasi, dalam masalah kebutuhan manusia termotivasi bukan oleh perikraan atas apa-apa yang dibutuhkannya, tetapi oleh keinginan mereka sendiri. Nilai-nilai kemanusiaan (martabat manusia), konsep ini lebih bersifat etis filosofis daripada kesimpulan ilmiah.¹⁵

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, oleh sebab itu pada saat ini ada istilah pendidikan berlangsung sepanjang hayat. Manusia diperintahkan untuk menuntut ilmu dari buaian hingga liang lahad. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi:

أَطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

“Tuntutlah ilmu dari buaian hingga liang lahad.”

Konsep pendidikan seumur hidup (*Life Long Education*) mulai dari

¹⁵Eddy Sutrisno, *Budaya Organisasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 52.

masyarakat melalui kebijaksanaan Negara (Tap MPR No. IV/MPR/1973 jo. Tap. MPR No. IV/MPR/1978, tentang GBHN) yang menetapkan antara lain dalam bab IV bagian pendidikan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.¹⁶

Untuk itu, majelis ta’lim harus dikelola sesuai manajemen dalam pendidikan Islam, sebagaimana yang dikemukakan Ramayulis bahwa manajemen pendidikan Islam adalah proses pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki (umat Islam, lembaga pendidikan atau lainnya) baik perangkat keras maupun lunak. Pemanfaatan tersebut melalui kerja sama dengan orang lain secara efektif, efisien dan produktif untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan, baik di dunia maupun diakhirat.¹⁷ Lebih lanjut ditegaskan bahwa sistem manajemen dalam pendidikan Islam merupakan proses yang koordinatif, sistematis dan integrative. Proses itu dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, sampai pada pengawasan. Proses tersebut selalu didasari oleh nilai-nilai, oleh karena itu system itu sekaligus mempunyai nilai material dan spiritual.¹⁸

¹⁶Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), Cet. ke-1, 19

¹⁷Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), 236.

¹⁸Ibid., 237.

Sementara itu, Robbin mengatakan bahwa fungsi dasar manajemen yang paling penting adalah merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan.¹⁹ Senada dengan itu, Mahdi bin Ibrahim menyatakan bahwa fungsi manajemen atau tugas kepemimpinan dalam pelaksanaannya meliputi berbagai hal, yaitu: Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan dan pengawasan.²⁰

Sesuai dengan perkembangan terbaru pada saat ini di Indonesia, seharusnya majelis ta'lim dikelola sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut pada pasal 26 ayat 4, secara tegas disebutkan bahwa majelis ta'lim digolongkan ke dalam pendidikan nonformal, yang berarti bahwa majelis ta'lim harus dikelola sebagai lembaga pendidikan bukan sebagai lembaga da'wah. Sebagai lembaga pendidikan non-formal, penyelenggaraan majelis ta'lim harus memenuhi persyaratan pendidikan nonformal terutama yang terkait dengan guru/ustazd yang profesional dan diangkat secara resmi. Di samping itu peserta majelis ta'lim harus terdaftar dan mengikuti proses pembelajaran secara kontinu berdasarkan jadwal yang ditentukan. Selain dari itu majelis ta'lim harus mempunyai kurikulum yang tetap,

jelas dan terarah, serta hasil belajarnya bisa dievaluasi.

Dengan demikian, majelis ta'lim sebagai lembaga pendidikan agama non formal adalah termasuk lembaga atau sarana dakwah Islamiyah yang dapat mengembangkan kegiatan yang berfungsi untuk membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang bertqwa kepada Allah SWT.

Maka sebenarnya dengan dimasukkannya majelis ta'lim dalam jenis lembaga pendidikan nonformal sebagaimana dalam amanat UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, membawa konsekuensi pada segala kegiatannya pada pola-pola pendidikan non-formal itu sendiri, seperti kurikulum pembelajarannya, metode dan pendekatan pembelajarannya, manajemen kegiatannya dan lain-lain.²¹ Dengan demikian maka akan dapat membawa majelis ta'lim ini ke dalam kehidupan masyarakat modern dan globalisasi ini, sehingga dapat menjawab problem-problem sosial kemasyarakatan dan perkembangan teknologi serta komunikasi ini. Sehingga pada akhirnya majelis ta'lim mampu menjadi pendidikan nonformal yang keberadaannya dinantikan dan mampu menjawab tantangan kehidupan masyarakat dewasa ini, terutama dalam pembinaan ketahanan keluarga terutama di Provinsi Riau dan

¹⁹Stephen P. Robbins, *Management: Concepts and Practices* (New Jersey: Prentice Hall, 1984), 6.

²⁰Mahdi bin Ibrahim, *Amanah dalam Manajemen* (Jakarta: PT. Pustaka Al-Kautsar, 1997), 61.

²¹Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Permendikbud RI) No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

masyarakat Indonesia serta umat Islam pada umumnya.

Upaya-upaya menata dan mengembangkan program-program kegiatan dan manajemen kegiatan mutlak diperlukan demi untuk kemajuan dan upaya majelis ta'lim dalam menjawab tantangan zaman. Di antara rekonstruksi majelis ta'lim tersebut adalah dalam hal kepemimpinanannya.²² Untuk men-

²²Dari beberapa fungsi kepemimpinan (Gross (1961) mengajukan beberapa fungsi kepemimpinan yaitu: menentukan tujuan, menjelaskan, melaksanakan, memilih cara yang tepat, memberikan dan mengkoordinasikan tugas, memotivasi, menciptakan kesetiaan, mewakili kelompok serta merangsang para anggota untuk bekerja. Stongdill (1959) berpendapat, bahwa telah menjadi tugas seorang pemimpin untuk memelihara struktur kelompok dan mengarahkan tujuan, serta untuk menengahi pertentangan tuntutan yang timbul baik di dalam maupun ke luar kelompok. Cattell (1957) melihat bahwa pemimpin melakukan fungsi-fungsi: tugas memelihara kelompok, menjunjung tinggi kepuasan peranan dan status, menjaga dan mempertahankan tuntunan (norma etis), memilih dan menjelaskan tujuan, menemukan dan menjelaskan cara-cara mencapai tujuan. Menurut Schuetz (1961), pemimpin memiliki fungsi-fungsi: menetapkan dan memantapkan tingkatan tujuan dan nilai-nilai kelompok, menetapkan dan mengintegrasikan bermacam-macam corak pikiran (kognisi) yang ada di dalam kelompok, mengoptimalkan penggunaan/pemanfaatan kemampuan anggota kelompok serta membantu para anggota memecahkan masalah yang berhubungan dengan penyesuaian diri dengan kebutuhan interpersonal.) sebenarnya kita dapat mengklasifikasikannya menjadi tiga fungsi pokok kepemimpinan pendidikan bila dilihat dari segi determinatif, yakni: (1) Fungsi yang berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai. Pada fungsi pertama ini, kita lihat sang pemimpin berusaha membantu kelompok untuk memikirkan, memilih dan merumuskan tujuan yang akan dicapai. Diperolehnya suatu

dukung keberhasilan kegiatan penggerakkan yang dilakukan oleh pemimpin, perlu diciptakan suatu iklim organisasi yang sehat yang merupakan fungsi ketiga dari pada kepemimpinan agar dapat mendorong peserta serta siapa saja yang terlibat dalam proses kerja sama untuk mencapai suatu taraf produktivitas dan kepuasan kerja yang tinggi.

Sebagaimana layaknya pendidikan formal yang memiliki kurikulum, silabus dan materi pembelajaran yang tersusun sistematis dengan perencanaan serta adanya evaluasi pembelajaran untuk mengetahui sejauhmana kegiatan yang telah dilaksanakan tercapai.

rumusan tujuan yang baik/memenuhi syarat, dapat dijadikan pedoman obyektif dalam menentukan tindakan-tindakan berikutnya (seperti merumuskan teknik, memilih alat yang tepat sampai pada cara melakukan pengawasan dan penilaian) sesuai dengan tuntunan organisasi. (2) Fungsi yang berkaitan dengan pengarahan pelaksanaan setiap kegiatan, dalam rangka mencapai tujuan kelompok. Fungsi kedua lebih banyak berhubungan dengan aktivitas manajerial pemimpin yang dilakukannya dalam rangka menggerakkan kelompok untuk memenuhi tuntunan organisasi. Fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pengarahan/penggerakkan tersebut bisa berangkat dari perencanaan sampai dengan pengawasan atau penilaian, karena segenap kegiatan bawahan dalam organisasi sejak awal sudah harus dikoordinasikan oleh pemimpin, agar dapat mengemban misi organisasi sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Teknik-teknik pengarahan/penggerakkan itu adalah *actuating, leading, directing, motivating*, dan *staffing*. (3) Yang berhubungan dengan penciptaan suasana kerja yang mendukung proses kegiatan administrasi berjalan dengan lancar, penuh semangat, sehat dan dengan kreativitas yang tinggi.

Disamping juga untuk mengetahui kendala-kendala, hambatan-hambatan maupun problem yang dihadapi baik oleh ustadz/ustadzah maupun peserta didik (dalam hal ini adalah ibu-ibu peserta kegiatan majelis ta'lim itu).

Masalah ini sangat penting, mengingat kegiatan-kegiatan majelis ta'lim yang berlangsung selama ini masih belum adanya kurikulum, silabus, materi maupun evaluasi akhir yang baku, yang dapat dipedomani dan jadi acuan kegiatan-kegiatan majelis taklim di manapun tempat, khususnya dalam hal ini adalah majelis-majelis ta'lim yang ada di Provinsi Riau.

Selanjutnya yang patut dicermati bagi para *da'i* yang melaksanakan kegiatan-kegiatannya di majelis ta'lim agar memperhatikan hal-hal berikut ini:

- a. Edukatif, juru dakwah bersifat edukatif apabila bertindak sebagai pendidik (edukator) dan bersikap sebagai guru.
- b. Materi dakwah, materi harus disajikan sesuai dengan aspek-aspek dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan cara tiap individu menerima dan memahaminya dengan tujuan yang hendak dicapai, dan disajikan secara metodologis.
- c. Metode dakwah, serupa dengan metode pendidikan,²³ juru

dakwah harus menguasai bermacam-macam metode dan terampil menggunakannya, komunikatif dan memperhitungkan kendala-kendalanya atau hambatan-hambatan psikologis dalam menerapkan suatu metode.²⁴

- d. Motivatif, juru dakwah sebagai motivator harus mengerti bahwa motif ini muncul sebagai latar belakang dari seluruh tingkah laku manusia yang timbul karena adanya dorongan

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ
ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَتَخَوَّنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ ، كَرَاهَةً
السَّامَةِ عَلَيْنَا . (رواه البخاري، و مسلم، والترمذي، وأحمد)

“Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad Ibnu Yusuf, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amas dari Abi Wa'il dari Ibnu Mas'ud, berkata: Nabi SAW. Selalu menyeling-nyelingi kami dalam beberapa dengan nasehat karena khawatir membosankan.” (HR. al-Bukhari, Muslim, al-Turmuzi, dan Imam Ahmad)

²⁴Dalam pengertian *litterlijk*, kata “metode” berasal dari bahasa Greek yang terdiri dari “meta” yang berarti “melalui,” dan “hodos” yang berarti “jalan.” Jadi metode berarti “jalan yang dilalui.” Dalam bahasa Arab, metode dikenal dengan istilah *thariqah* yang berarti langkah-langkah strategis dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam pengertian umum, metode diartikan sebagai cara mengerjakan sesuatu. Dalam pandangan filosofis pendidikan, metode merupakan alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Mahmud Yunus melihat, metode yang paling baik didalam pengajaran ialah metode yang dapat mengantarkan anak didik sampai kepada tujuan dengan jalan yang paling singkat, dengan penghematan tenaga, yang tidak menjadikan murid terlalu susah dan tidak menyebabkan kebosanan akalunya. Mahmud Yunus dkk., *Al-Tarbiyah wa al-Ta'lim*, Juz I C, (Gontor: Darussalam Press, t.t.), 12.

²³Hadis mengenai metode pembelajaran yang pernah dilakukan Rasulullah SAW.:

- kebutuhan yang muncul setiap saat.
- e. Sugestif, juru dakwah mampu menjadi inspirasi dan memberi kekuatan bagi jamaahnya dalam melakukan kegiatan-kegiatan-nya.
 - f. Persuasif, pendekatan persuasi dalam dakwah adalah seni dan ilmu tentang menghimbau secara ekstralogis untuk menjamin keputusan yang diinginkan dengan prinsip-prinsip argumentasi.

Dengan model pendekatan dan strategi seperti tersebut di atas, disesuaikan dengan situasi dan kondisi jamaah yang dihadapi, maka memungkinkan kegiatan-kegiatan majelis ta'lim makin diminati dan mendapat tempat di hati masyarakat.

Majelis ta'lim merupakan mata rantai perjuangan umat Islam dalam menciptakan peradaban Islam. Setidaknya ada beberapa hal yang menurut penulis perlu diperhatikan oleh para pengelola majelis ta'lim kaum ibu untuk menjadi majelis ta'lim ideal, terutama kaitannya dengan penelitian ini, yaitu rekonstruksi model majelis ta'lim dalam pembinaan ketahanan keluarga di Provinsi Riau. Berikut ini adalah hal-hal yang patut jadi bahan pertimbangan dasar dalam rekonstruksi majelis ta'lim di Provinsi Riau kedepan:

Pertama, soliditas kepengurusan. Sudah menjadi rahasia umum bila lembaga atau ormas Islam di Indonesia mengalami krisis kepengurusan. Hal ini juga terjadi di

tubuh majelis ta'lim. Agar kepengurusan majelis ta'lim bisa berjalan dengan baik maka harus dipilih orang-orang yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap persoalan kemajelis takliman dan keumatan, memiliki kemauan dan kemampuan dalam bekerja. Serta mau bekerja sama dan selalu menjaga persatuan dan kesatuan dikalangan pengurus.

Kenyataan yang terjadi pada kepengurusan majelis ta'lim di daerah-daerah di Provinsi Riau (baik ditingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan bahkan untuk tingkat pertama/tingkat desa atau kelurahan), selalu diwarnai dan tarik menarik kepentingan politik praktis, sehingga yang terjadi pengurus yang terpilih terutama ketua selalu diisi oleh orang-orang yang secara kedudukan sebagai penguasa/pejabat di daerah tersebut atau isteri dari pejabat daerah tersebut.²⁵ Padahal menurut hemat penulis, dengan adanya beberapa pengurus/ketua yang memiliki agenda-agenda tertentu justru akan menimbulkan konflik kepentingan, sehingga soliditas kepengurusan terancam.

Dan bahayanya, jika terjadi dalam suatu daerah pergantian kepemimpinan/pejabat, sedangkan

²⁵Wawancara dengan Sekretaris BKMT Provinsi Riau dan Sekretaris BKMT Kabupaten Kampar, dan menurut beliau berdua tersebut membenarkan hal itu, bahkan memang dikondisikan untuk di ketua diambil dari isteri pejabat daerah/pejabat daerah itu sendiri, dengan alasan untuk kemudahan BKMT dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya khususnya dalam hal pendanaan/keuangan. Wawancara hari Selasa 8 Desember 2015.

pejabat yang lama tidak memimpin lagi, sementara kepengurusan majelis ta'lim masih dipegang, maka akan menyulitkan gerak dan kegiatan majelis ta'lim di daerah tersebut. Hal ini terjadi pada kasus kepengurusan majelis ta'lim kabupaten Kampar, yang berimbas pada kefakuman majelis ta'lim majelis ta'lim di kabupaten Kampar setelah selesai pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan kepala daerah. Maka sebaiknya adalah kepengurusan majelis ta'lim (terutama pengurus inti) adalah orang-orang yang independen dan bukan pengurus partai politik yang aktif di kepengurusan politik praktis serta bebas dari konflik kepentingan.

Kedua, kaderisasi guru. Barangkali masalah ini yang seringkali dilupakan. Pengkaderan guru atau da'iyah perlu dilakukan oleh pengurus majelis ta'lim. Karena seyogyanya fungsi majelis taklim adalah kaderisasi. Sehingga kerja dakwah suatu majelis ta'lim akan tetap berlanjut, meski guru sepuh mereka wafat. Ini terjadi hampir di seluruh majelis ta'lim yang ada, bahkan pada masyarakat secara umum, bahwa hilangnya (wafat) ulama'/ustadz/kyiai/orang alim akan sangat sulit sekali mencari pengganti. Karena memang kaderisasi ulama sangat sulit dan sangat jarang dikerjakan.

Ketiga, rekrutmen anggota anggota. Keterlibatan kaum ibu dalam kegiatan majelis ta'lim di daerah Riau secara keseluruhan

memang dirasakan masih amat rendah bila dibandingkan dengan jumlah perempuan di Indonesia atau majelis ta'lim yang ada ditempat lain khususnya di daerah-daerah jawa. Pengurus majelis ta'lim perlu melakukan upaya merekrut anggota baru dengan melibatkan dalam berbagai kegiatan.

Salah satu pendekatan yang penting yang perlu dilakukan adalah secara individual dan dari hati ke hati. Dan biasanya yang terjadi adalah anggota-anggota majelis taklim keikutsertaannya hanya spontanitas, ikut-ikutan dan tanpa kesadaran penuh. Padahal Semakin banyak kaum ibu yang terlibat dalam majelis ta'lim maka ini semakin banyak tercipta keluarga Islam yang kokoh menuju keluarga sakinah, mawaddah warahmah.

Keempat, tingkatkan program dan sarana. Banyak majelis ta'lim yang tidak merencanakan program yang dibutuhkan oleh anggotanya. Untuk itu, majelis ta'lim diharapkan kreatif dan variatif merancang program-program, khususnya program-program yang menarik dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga serta masyarakat secara umum. Untuk menunjang program-program ini juga harus didukung dengan sarana yang memadai.

Mengenai sarana prasarana bagi kegiatan majelis ta'lim ini masih sangat memprihatinkan, karena memang kegiatan-kegiatannya menumpang pada masjid-masjid maupun mushalla yang ada. Padahal idealnya organisasi memiliki sarana

prasarana sendiri untuk penunjang dan kesuksesan kegiatannya.

Kelima, ketahanan finansial. Mandegnya program-program majelis ta'lim bisa jadi disebabkan persoalan finansial. Dan memang diakui bahwa kegiatan dan gerak suatu organisasi perlu dukungan dana yang kuat dan banyak. Untuk memecahkan masalah ini majelis ta'lim bisa menghimpun dana dari para anggotanya dan kreatifitas dari para pengurus dalam menggali dana, baik dari usaha organisasi, maupun sumber-sumber yang lain serta diusahakan dengan berbagai cara dan pendekatan. Dan Untuk membangun kepercayaan anggota, pengurus majelis ta'lim perlu melaporkan pemasukan dan pengeluaran dana secara transparan dan akuntabel. Kenyataan yang terjadi majelis taklim-majelis ta'lim di Provinsi Riau, sumber dana mengandalkan bantuan dana dari pemerintah daerah setempat melalui APBD provinsi ataupun kabupaten kota, baik tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, dan belum ada terobosan-terobosan yang lain untuk masalah penggalangan dana ini. Padahal kalau dilihat dari potensi yang ada, di Provinsi Riau masih sangat memungkinkan untuk penggalangan dana bagi kegiatan majelis ta'lim ini, seperti donatur-donatur yang tidak mengikat, amal usaha organisasi, perusahaan-perusahaan yang ada baik perkebunan maupun industri, kerja sama antar organisasi sosial kemasyarakatan dan lain-lain.

3. KESIMPULAN

Pada umumnya majelis ta'lim itu diselenggarakan seadanya, sehingga majelis ta'lim hanya sebagai kelompok pengajian, perwiridan yang diikuti oleh umat Islam khususnya ibu-ibu secara sukarela dan tanpa adanya perencanaan yang matang sebelumnya. Padahal sebagai lembaga pendidikan nonformal, majelis ta'lim menjadi pemenuhan kebutuhan pendidikan sepanjang hayat masyarakat dan pengembangan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat/manusia yang tidak terpenuhi oleh lembaga pendidikan formal.

Struktur dan program kerja pengurus, rencana dan jadwal kegiatan pembinaan rutin, materi dan bahan-bahan pembinaan tersusun rapi dan sistematis (kurikulum baku), penceramah dan nara sumber yang ahli dan berkompeten. (kualifikasi pendidikan), sarana dan prasarana atau media penyampaian materi kegiatan yang memadai, metode yang dipergunakan dalam kegiatan pembinaan, adanya model evaluasi kegiatan bagi peserta dan pelaksanaan kegiatan, tindak lanjut (*follow up*) hasil evaluasi peserta dan kegiatan pelaksanaan, sertifikat atau tanda keberhasilan bagi peserta kegiatan pembinaan, jenjang atau tingkatan (kelas) peserta kegiatan, adanya aturan-aturan dan tata tertib peserta kegiatan pembinaan, adanya buku-buku dan bahan-bahan sumber bacaan sebagai penunjang kegiatan pembinaan (perpustakaan), adanya pendanaan/sumber dana yang teratur dan memadai (iuran peserta

berbentuk SPP, dana alokasi dari pihak pemerintah maupun penyelenggara/yayasan, donatur dan lain-lain), jaminan mutu/ke-mampuan peserta kegiatan yang terukur, adanya kerjasama dengan organisasi dan instansi terkait (BKKBN, Dinas Sosial, Darma Wanita dan lain-lain).

Kepada pengurus majelis ta'lim yang ada di Provinsi Riau agar dapat memperluas dan mengintensifkan kegiatan-kegiatan majelis ta'lim dalam rangka memberikan kontribusi pencerahan keagamaan terhadap masyarakat dan pembinaan ketahanan keluarga, terutama kegiatan dengan kategori pendidikan yang memiliki metode sistematis dan ilmiah sehingga mampu meningkatkan wawasan intelektual dan perubahan perilaku keberagamaan jama'ah yang lebih baik, serta peningkatan ketahanan keluarga.

Kepada Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) Provinsi Riau agar dapat melakukan kontrol agar majelis ta'lim yang ada dapat menyusun program yang memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan pemahaman keberagamaan masyarakat di seluruh Provinsi Riau terutama tentang program pembinaan ketahanan keluarga. Agar dilakukan penataan dan pembaharuan kegiatan majelis ta'lim yang mampu memadukan berbagai unsur ajaran Islam, baik ibadah *mahdhah*, kegiatan pendidikan dan ibadah *ghair mahdhah* bernilai sosial kemasyarakatan secara komprehensif dan sesuai dengan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

REFERENSI

- [1] Abdullah, Abdurrahman Saleh. *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*. Terjemah H.M. Ariffin. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- [2] Ahmad, Amrullah. *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Prima Duta, 1983.
- [3] Alawiyah, Tuti. *Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Ta'lim*. Bandung: Mizan, 1997. Cet. Ke-1
- [4] Al-Ghazzali, Syekh Muhammad. *Hamum Da'iyah*. Terjemah Muhammad Jamaluddin. Bandung: Mizan, 1985.
- [5] Ali, Hamdani. *Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Kota Kembang, 1987.
- [6] Al-Madkhali, Rabi bin Hadi. *Manhaj Da'wah Para Nabi*. Jakarta: PT. Gema Insani Press, 1992.
- [7] Al-Maududi, Abu al-A'la, *Tazdkirah Du'at al-Islam (Petunjuk untuk Juru Da'wah)*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1982.
- [8] Al-Qarni, 'Aidh bin 'Abdullah. *Ala Ma'idah al-Qur'an/ Nikmatnya Hidangan Al-Qur'an*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- [9] AM. Sardiman. *Interkasi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- [10] Arifin, A. Muzayyin. *Kapita Selekta Pendidikan*. Cet. ke-1. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

- [11] Arifin, M. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Cet. ke-3. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- [12] Arifin, M. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 2005.
- [13] Bryson, Jhon M. *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organization*. California USA: Jossey Bass San Francisco, 1988.
- [14] Chirzin, M. Habib. *Pesantren dan Pembaharuan*. Cet. ke-3, Jakarta: LP3ES, t.t.
- [15] Dahlan, Alwi. *Prospek Da'wah dalam Era Informasi*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1997.
- [16] Dunn, William N. *Public Policy Analysis*. USA: Printice Hall, Inc Englowood Cliffs, 1973.
- [17] Fatah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- [18] Fillippo, Edwin B. *Manajemen Personalia*. Jakarta: Erlangga, 1998. Edisi Keenam.
- [19] Furchan, H. Arief. *Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Gama Media, 2004.
- [20] Hikmat. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- [21] Huda, Nurul (e.d.). *Pedoman Majelis Ta'lim*. Jakarta: Koordinasi Dakwah Islam (KODI), 1986/1987.
- [22] Husain, Syed Sajjaj, dkk. *Krisis Pendidikan Islam*. Bandung: Risalah, 1986.
- [23] Jalaludin dan Idi, Abdullah. *Filsafat Pendidikan*. Jakarta: PT. Gaya Media Pratama. 1991.
- [24] Kalali M., Asad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987. Cet. ke-2.
- [25] *Kampar dalam Angka (Kampar in Figures)*. Tahun 2009.
- [26] Khaliq, Syaikh Abdurrahman 'Abd, *Fushul min al-Siyasah fi Da'wah ila Allah*. Terjemahan Marsuni Sasaky dan Mustahab Hasbullah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.
- [27] Koordinasi Da'wah Islam (KODI). *Pedoman Majelis Ta'lim*. Jakarta: t.p., 1990. Cet. ke-2
- [28] Langgulong, Hasan. *Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Pustaka Al-Husna, 1989.
- [29] Langgulong, Hasan. *Pendidikan dan Peradaban Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1992.
- [30] Mahfuzh. *Filsafat Da'wah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- [31] Mahmud, Ali 'Abd al-Halim, *Fiqh al-Da'wah ila Allah*. Terjemah M. Thoha Anwar. Jakarta: Studi Press, 2002.
- [32] Mastuhu. "Kesiapan Madrasah Aliyah dalam Menyongsong Tahun 2000." *Makalah*. Seminar Sehari di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Jakarta, 9 November 1991.
- [33] Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS, 1994
- [34] Megawangi, Ratna, dkk. *Pendidikan Holistik*. Jakarta: Indonesia Heritage Foundation. 2005.
- [35] Mudyaharjo, Redja. *Pengantar Pendidikan: Sebuah Awal tentang*

- Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- [36] Muhmidayeli. *Filsafat Pendidikan Islam.* Pekanbaru: LSFK2P, 2005.
- [37] Mukhtar. *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.* Jakarta: CV Misaka Galiza, 2003. Cet. ke-1.
- [38] Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawir: Kamus Bahasa Arab-Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- [39] Nata, Abuddin. *Filsafat Pendidikan Islam.* Jakarta: PT. Logo Wacana Ilmu, 2001.
- [40] Nizar, Syamsul. *Filsafat Pendidikan Islam,* Jakarta: Kalam Mulia, 2008.
- [41] Pidarta, Made. *Peranan Kepala Sekolah pada Pendidikan Dasar.* Jakarta: PT. Gramedia Mediasarana Indonesia, 1998.
- [42] Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Bagian 1. Cet. ke-4. Jakarta: Balai Pustaka, 1966.
- [43] Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam,* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.
- [44] Redaksi, Dewan. *Ensiklopedi Islam.* Jilid 3. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994. Cet. ke-4
- [45] RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an, 2004.
- [46] RI, Departemen Agama. *Modul Pelatihan Manajemen Lembaga Dakwah.* Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam, Proyek Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Pusat, 2003.
- [47] RI, Departemen Agama. *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan.* Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2006.
- [48] RI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Pustaka, 1999. Cet. ke-10.
- [49] RI, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama. *Direktori Lembaga Da'wah.* Jakarta: Departemen Agama, 1992.
- [50] RI, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama. *Pedoman Majelis Ta'lim.* Jakarta: Proyek Penerangan, Bimbiangan dan Da'wah, 1984.
- [51] Sagala, H. Syaiful. *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat.* Jakarta: Rakasta Samasta, 2004.
- [52] Sagala, H. Syaiful. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan.* Bandung: Alfabeta, 2008.
- [53] Sallis, E. *Total Quality Manajement in Education.* London: Kogam Page Ltd, 1993.
- [54] Sanakiy, Hujair AH. *Paradigma Pendidikan Islam.* Yogyakarta: PT. Satria Insania Press, 2005.
- [55] Supardi, Nidi Sastra. *Psikologi Pendidikan.* Bandung: Pusat Pengembangan Penataran Guru Tertulis, 1989.

- [56] Sutrisno, Edy. *Budaya Organisasi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- [57] Syah, Muhibbin. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT. Remadja Rosdakarya, 1995.
- [58] Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005. Cet. ke-6.
- [59] Tilaar, HAR. *Manifesto Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kompas. 2005.
- [60] Tohirin. *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- [61] Uno, Hamzah B. *Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2008.
- [62] Zainuddin dkk. *Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991. Cet. ke-1
- [63] Zuhairi, dkk. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.